Katalog: : 9302023.3572

Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Pengeluaran

2013-2017

https://blitarkota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BLITAR

Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Pengeluaran

2013-2017

http://blitarkota.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BLITAR
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

Nomor Publikasi : *35720.1802*
Katalog BPS *:* 9302023.3572

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman : xiv + 75 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit/*Cover*:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kota Blitar

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://blitarkota.bps.go.id

TIM PENYUSUN / *DRAFTING TEAM*

Pengarah/*Referrers*:
Erny Fatma Setyoharini, SE, MM

Penanggungjawab/ *Person in Charge*:
Dyah Sari Prihantari, S.ST, M.S.E

Penyunting/*Editor*:
Dyah Sari Prihantari, S.ST, M.S.E

Penulis dan Pengolah Data/ Writer and *Data Processor*:
Rinda Fitriani, S.ST
Umi Sofiyah Hidayati
Mujiharto

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Blitar, Agustus 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BLITAR

Erny Fatma Setyoharini, SE,MM.

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar	…….....	v
Daftar Isi	……..	vii
Daftar Tabel	……	ix
Daftar Grafik	……...	xi
Daftar Lampiran	……..	xiii
BAB I	PENDAHULUAN …….....	1
	1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
	1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB …….……	6
BAB II	METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA ……	11
	2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga …….……..	13
	2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT …….…….....	15
	2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah …….……	17
	2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) …….……	19
	2.5 Perubahan Inventori …….…….…….	22
	2.6 Ekspor - Impor …….....……	25
BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BLITAR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA BLITAR TAHUN 2013-2017 ...….....	27
	3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	29
	3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran …….	37
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	51
	4.1 PDRB (Nominal) …….....….	53
	4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor……..	54
	4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ……..…….	55

https://blitarkota.bps.go.id

4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB …… 56
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB ……..… 57
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor ……..….. 57
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan …. 58
4.8 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*) ……... 59

PENUTUP ……..... 61

LAMPIRAN …… 65

DAFTAR PUSTAKA …….. 73

https://blitarkota.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013-2017 …….....	30
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013-2017 ……....	31
Tabel 3	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013-2017.....……...……	33
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013-2017.....…….....…….....	35
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013-2017 ….....……..……....	36
Tabel 6	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Blitar, Tahun 2013-2017 ……..……....	38
Tabel 7	Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Blitar Tahun 2013-2017 ……..……....	40
Tabel 8	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Blitar Tahun 2013-2017 …….....	41
Tabel 9	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Blitar Tahun 2013-2017 …….…….	42
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Blitar Tahun 2013-2017 ……...	43
Tabel 11	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Blitar Tahun 2013-2017 ……..	45
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Blitar Tahun 2013-2017 ……....	46
Tabel 13	Perkembangan Ekspor Kota Blitar, Tahun 2013-2017 ……..	47
Tabel 14	Perkembangan Impor Kota Blitar, Tahun 2013-2017.....	49
Tabel 15	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2013-2017 …….....	53
Tabel 16	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013-2017 ……	54

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 17 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-2017 ……..... 55
Tabel 18 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Blitar Tahun 2013-2017 ……..... 56
Tabel 19 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013-2017 ……....……. 57
Tabel 20 Rasio PDRB terhadap Impor Kota Blitar Tahun 2013-2017..... 58
Tabel 21 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Blitar Tahun 2013-2017 …….. 58
Tabel 22 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kota Blitar Tahun 2013-2017 …. 60

https://blitarkota.bps.go.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017…….	30
Grafik 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 – 2017……..	32
Grafik 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 – 2017……...	32
Grafik 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 – 2017……	34
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 – 2017……...	36

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017 ……..	67
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017 ……...	68
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017 ..	69
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013-2017…….....	70
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017 ……..	71
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013- 2017	72

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

Bab 1
Pendahuluan

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)[1]. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side)* dan sisi permintaan (*demand side)* barang dan jasa.

Secara konsep[2] penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang

[1] *Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)*
[2] *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

https://blitarkota.bps.go.id

sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa *(output)* yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

https://blitarkota.bps.go.id

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat[3], yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **"output akhir (*final output*)"**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

https://blitarkota.bps.go.id

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (*Income*)	= PDRB Produksi
C (*Consumption*)	= Konsumsi akhir
GFCF (*Gross Fixed Capital Formation*)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau

3. - *Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik*
   - *Disebut sebagai pendekatan "riil"*
   - *Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut*

defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto" .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

https://blitarkota.bps.go.id

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (*SNA*) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut

diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

https://blitarkotabps.go.id

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan kualitas PDRB;
c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun[4];
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

https://blitarkota.bps.go.id

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan

  a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari

[4] *SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"*

output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases,* yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

https://blitarkota.bps.go.id

- Metodologi

  Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (*IBSC*).

- Valuasi

  Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

  Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

https://blitarkota.bps.go.id

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

Bab 2
Metode Estimasi dan Sumber Data

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran[1]. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

https://blitarkota.bps.go.id

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

[1] *Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah*

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

https://blitarkota.bps.go.id

2.2 *PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)*

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

https://blitarkota.bps.go.id

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
c. Penyusutan
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

https://blitarkota.bps.go.id

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

https://blitarkota.bps.go.id

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan Bappeda
b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Bappeda
e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

https://blitarkota.bps.go.id

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output –
Penjualan barang dan jasa +
Social transfer in kind purchased market production +
Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakaan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 *PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)*

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

https://blitarkota.bps.go.id

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

a. Output industri konstruksi, BPS
b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
j. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

https://blitarkota.bps.go.id

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

  PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

  PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

  PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

  IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

  Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

  Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x Indeks Produksi (t)

https://blitarkota.bps.go.id

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

https://blitarkota.bps.go.id

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
f. Ternak untuk tujuan dipotong;
g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

https://blitarkota.bps.go.id

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 *EKSPOR - IMPOR*

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

https://blitarkota.bps.go.id

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metoda tidak langsung.

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

Bab 3
Tinjauan Perekonomian Kota Blitar Berdasarkan PDRB Pengeluaran Kota Blitar Tahun 2013-2017

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (*SNA*) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kota Blitar baik atas dasar atas dasar harga Berlaku dan harga konstan (2010=100) pada tahun 2017 mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya. PDRB Kota Blitar pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku meningkat dari 5,33 triliun rupiah menjadi 5,80 triliun rupiah sedangkan untuk harga konstan mengalami peningkatan sebesar 235,86 milyar, yakni dari 4,08 triliun Rupiah menjadi 4,32 triliun Rupiah, atau meningkat sebesar 5,78 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Blitar periode 2013 - 2017 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 6,50 persen; 5,88 persen; 5,68 persen; 5,76 persen; dan 5,78 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang selalu tumbuh di atas 6 persen setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2013 - 2018 PDRB Kota Blitar atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 3,93 triliun rupiah (2013); 4,35 triliun rupiah (2014); 4,82 triliun rupiah (2015); 5,33 triliun rupiah (2016); dan 5,80 triliun rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Blitar pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

https://BlitarKota.bps.go.id

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar. 2013 - 2017

Table 1. GRDP at current price by Expenditure, Blitar Municipality 2013-2017

(Juta Rp/*million Rp*)

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	2.837.965,04	3.101.773,82	3.311.857,53	3.636.358,97	3.951.001,32
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	46.381,23	52.990,23	58.751,61	61.306,98	65.283,32
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	1.144.954,49	1.192.827,41	1.277.685,89	1.257.504,56	1.398.841,05
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	823.132,77	905.927,61	993.708,01	1.100.380,58	1.206.373,72
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	85,70	23.961,83	2.195,81	2.214,81	2.294,54
6. Ekspor/*Export*	1.613.286,60	1.784.228,48	2.050.833,05	2.320.022,54	2.701.776,51
7. Impor/*Import*	2.536.296,76	2.707.425,26	2.875.903,93	3.046.501,70	3.523.206,33
PDRB / *GRDP*	3.929.509,08	4.354.284,12	4.819.127,97	5.331.286,72	5.802.364,14

https://blitarkota.bps.go.id

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017

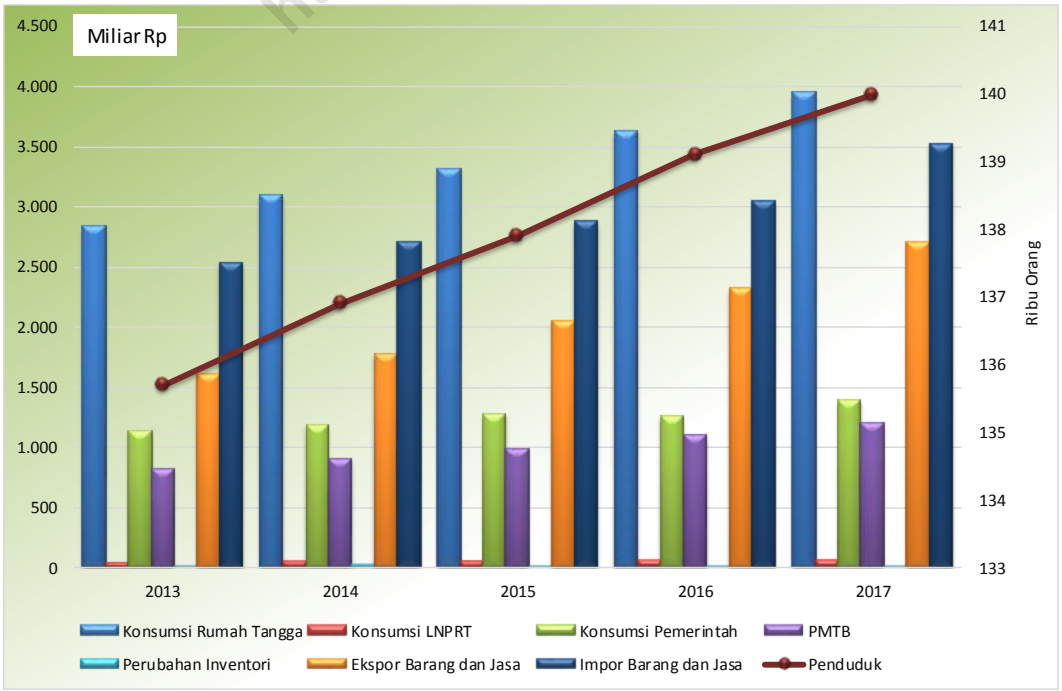

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Blitar pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017

Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Blitar Municipality 2013-2017

(Juta Rp/*Million Rp)*

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	2.451.237,64	2.589.073,11	2.682.121,38	2.811.628,13	2.946.601,92
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	33.188,22	37.880,52	38.553,37	39.605,88	40.532,24
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	774.074,38	793.317,99	808.000,27	757.479,47	785.082,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	697.194,75	722.508,50	762.615,94	807.132,21	855.586,61
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	122,01	31.971,55	2.718,86	2.676,00	2.749,85
6. Ekspor/*Export*	1.469.845,48	1.568.097,01	1.715.228,89	1.903.667,52	2.144.285,36
7. Impor/*Import*	1.978.830,35	2.093.199,37	2.152.330,28	2.242.930,37	2.459.823,49
PDRB / *GRDP*	3.446.832,13	3.649.649,30	3.856.908,42	4.079.258,84	4.315.014,82

https://blitarkota.bps.go.id

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kota Blitar meningkat, yakni sebesar 3,45 triliun rupiah (2013); 3,65 triliun rupiah (2014); 3,86 triliun rupiah (2015); 4,08 triliun rupiah (2016); dan 4,32 triliun rupiah (2017). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar cenderung melambat namun kembali mengalami percepatan di tahun 2016 dan 2017, yakni dari 5,68 persen pada tahun 2015 menjadi 5,78 persen pada tahun 2017.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017

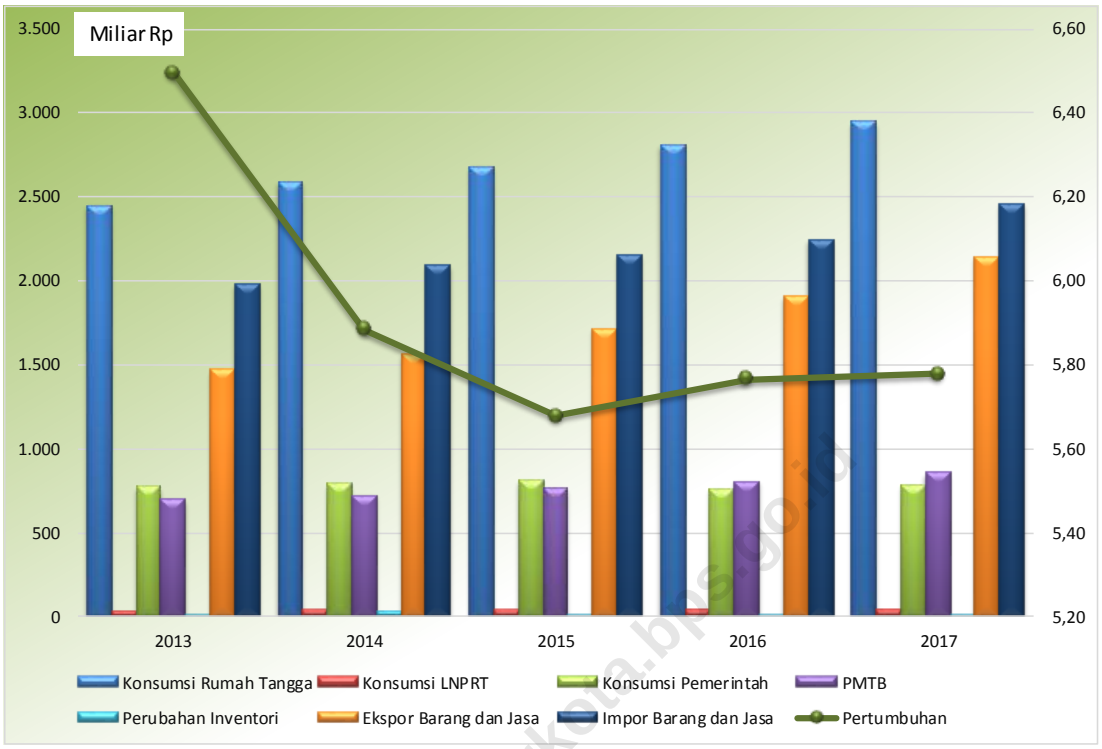

Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017

Figure 3. Comparing of GRDP at current price and GRDP at Constant Price 2010, Blitar Municipality 2013-2017

https://blitarkota.bps.go.id

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan..

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017

Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Blitar Municipality 2013-2017

(%)

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	72,22	71,23	68,72	68,21	68,09
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	1,18	1,22	1,22	1,15	1,13
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	29,14	27,39	26,51	23,59	24,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	20,95	20,81	20,62	20,64	20,79
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	0,00	0,55	0,05	0,04	0,04
6. Ekspor/*Export*	41,06	40,98	42,56	43,52	46,56
7. Impor/*Import*	64,54	62,18	59,68	57,14	60,72
PDRB / *GRDP*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

https://blitarkota.bps.go.id

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kota Blitar sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mepunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 20 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 41 s.d 46 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 60 s.d 64 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017

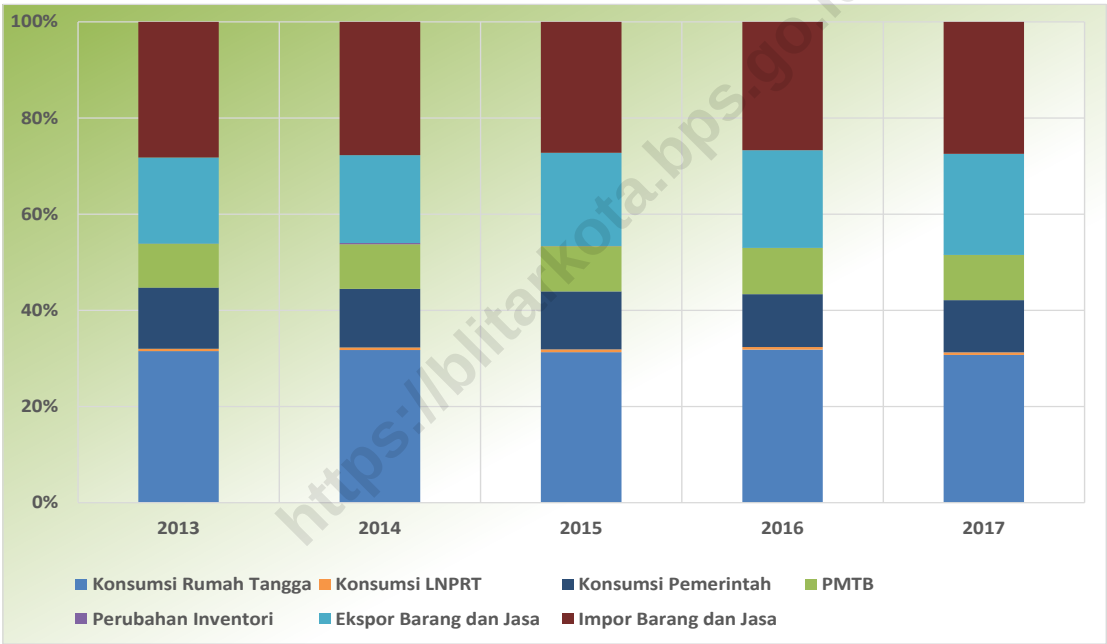

https://blitarkota.bps.go.id

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 24 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB juga relatif besar. Di sisi lain, pada tahun 2013-2017 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Hal ini bisa dimaklumi karena dari sisi produksi, Kota Blitar masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya sehingga harus mendatangkan dari luar wilayah Kota Blitar.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat

dari tabel 4, selama periode tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar berfluktuasi yakni sebesar 6,50 persen (2013); 5,88 persen (2014); 5,68 persen (2015); 5,76 persen (2016); dan 5,78 persen (2017). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017

Table 4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Blitar Municipality 2013-2017

(%)

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	6,53	5,62	3,59	4,83	4,80
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	9,25	14,14	1,78	2,73	2,34
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	5,15	2,49	1,85	-6,25	3,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	3,95	3,63	5,55	5,84	6,00
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	336,51	26.104,07	-91,50	-1,58	2,76
6. Ekspor/*Export*	9,84	6,68	9,38	10,99	12,64
7. Impor/*Import*	7,55	5,78	2,82	4,21	9,67
PDRB / *GRDP*	6,50	5,88	5,68	5,76	5,78

https://blitarkota.bps.go.id

Indeks implisit[1] PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013 – 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

[1] *Indeks perkembangan*

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017

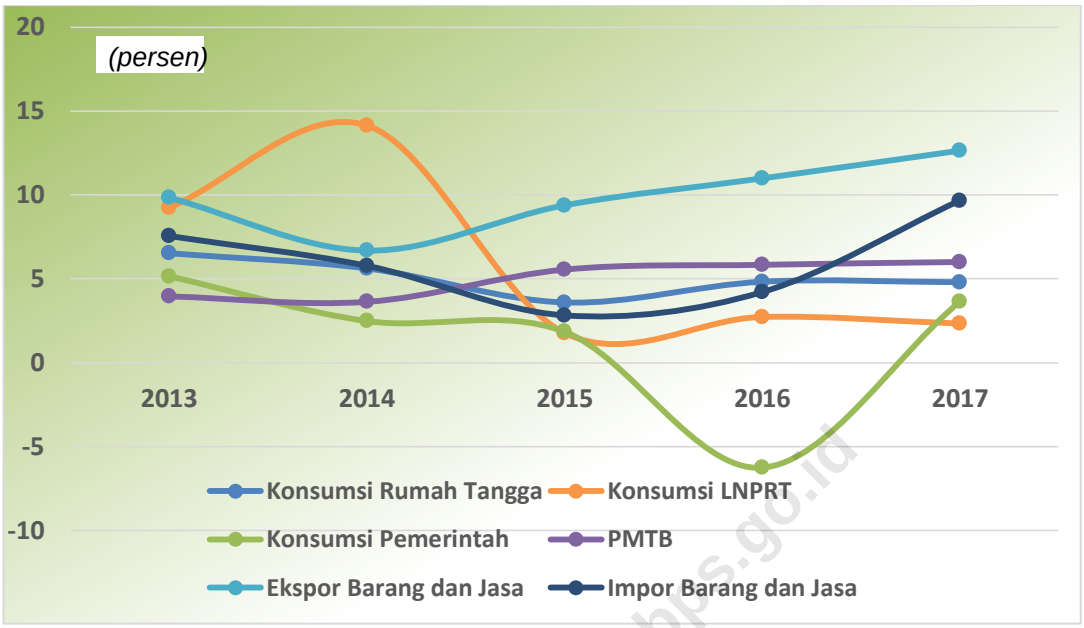

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Blitar 2013 - 2017
Table 5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Blitar Municipality 2013-2017

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	115,78	119,80	123,48	129,33	134,09
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	139,75	139,89	152,39	154,79	161,07
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	147,91	150,36	158,13	166,01	178,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	118,06	125,39	130,30	136,33	141,00
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	70,24	74,95	80,76	82,77	83,44
6. Ekspor/*Export*	109,76	113,78	119,57	121,87	126,00
7. Impor/*Import*	128,17	129,34	133,62	135,83	143,23
PDRB / *GRDP*	114,00	119,31	124,95	130,69	134,47

https://blitarkota.bps.go.id

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Blitar untuk periode 2013 – 2017.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Blitar, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Blitar maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

https://blitarkota.bps.go.id

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 – 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran

konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Blitar 2013 - 2017

Table 6. Trend of Using on Final Household Consumption of Blitar Municipality 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Total Konsumsi Rumah Tangga/*Total of Household Consumption*					
a. ADHB / *Currrent Prices* (Juta Rp/*Million Rp)*	2.837.965,04	3.101.773,82	3.311.857,53	3.636.358,97	3.951.001,32
b. ADHK 2010/*2010 Constant Prices* (Juta Rp/*Million Rp)*	2.451.237,64	2.589.073,11	2.682.121,38	2.811.628,13	2.946.601,92
Proporsi terhadap PDRB/ *Proportion to GRDP* (% ADHB / *Currrent Prices)*	72,22	71,23	68,72	68,21	68,09
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ *Average of per-capita consumtion* (Ribu Rp/*Thousand Rp)*					
a. ADHB / *Currrent Prices* (Ribu Rp/*Thousand Rp)*	20.913,21	22.656,73	24.014,98	26.138,85	28.222,45
b. ADHK 2010/*2010 Constant Prices* (Ribu Rp/*Thousand Rp)*	18.063,39	18.911,73	19.448,63	20.210,53	21.047,91
Pertumbuhan/*Growth*[2]					
a. Total konsumsi RT/ *Total of Household Consumption*	6,53	5,62	3,59	4,83	4,80
b. Perkapita/*Per capita*	5,76	4,70	2,84	3,92	4,14
Jumlah penduduk/*Number of population (000* orang/*person)*	135.702	136.903	137.908	139.117	139.995

Selama periode 2013 – 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung menurun yaitu 72,22 persen (2013); 71,23 persen (2014); 68,72 persen (2015); 68,21 persen (2016) dan 68,09 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2017.

[2] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

https://blitarkota.bps.go.id

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumahtangga di Kota Blitar menghabiskan dana hampir sekitar 21 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 22,66 juta Rupiah (2014); 24,01 juta Rupiah (2015); 26,14 juta Rupiah (2016); dan 28,22 juta Rupiah (2017).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan melambat dari 6,53 persen ditahun 2013 menjadi sebesar 5,62 persen (2014) dan 3,59 persen (2015). Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat menjadi 4,83 persen (2016) dan 4,80 persen (2017). Pertumbuhan konsumsi per-kapita selaras dengan pertumbuhan konsumsi total adh Konstan dari 5,76 persen ditahun 2013 menjadi sebesar 4,70 persen (2014) dan 2,84 persen (2015). Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat menjadi 3,92 persen (2016) dan meningkat lagi menjadi 4,14 persen (2017).

Dari data tersebut tampak bahwa Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB.

Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukan peningkatan, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Blitar meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Peningkatan ini tentunya berpengaruh pula terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut.

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga
Kota Blitar 2013 - 2017

Table 7. Structure of Household Final Consumption Expenditure,
Blitar Municipality 2013-2017[3]

(%)

Kelompok Konsumsi/ ***Consumption group***	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ *Food, beverages, and tobacco*	25,75	24,36	23,66	23,27	23,01
b. Pakaian dan Alas Kaki/*Clothing and footwear*	2,72	2,65	2,65	2,72	2,77
a. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah/ *Housing, household equipment and routine household maintenance*	15,67	15,44	15,28	15,03	14,92
b. Kesehatan dan Pendidikan/ *Health and education*	11,15	10,87	11,62	11,79	11,82
c. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ *Transport, Communication, Recreation and culture*	26,74	28,09	28,12	28,14	28,42
d. Hotel dan Restoran/ *Hotels, and restaurants*	12,74	13,18	13,44	13,74	13,69
e. Lainnya/ *Miscellaneous goods and services*	5,22	5,42	5,23	5,32	5,37
Total Konsumsi/*Total of consumption*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

https://blitarkota.bps.go.id

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,74 persen, yang disebabkan oleh tingginya peningkatan harga pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki; dan kelompok Hotel dan Restoran.

[3] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*

Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Blitar 2013 - 2017

Table 8. Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure, Blitar Municipality 2013-2017[4]

(%)

Kelompok Konsumsi/ ***Consumption group***	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ *Food, beverages, and tobacco*	3,51	1,28	2,24	4,73	3,89
b. Pakaian dan Alas Kaki/*Clothing and footwear*	2,14	0,41	1,04	8,46	6,13
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah/ *Housing, household equipment and routine household maintenance*	2,99	4,54	1,17	3,04	3,30
d. Kesehatan dan Pendidikan/ *Health and education*	3,52	2,29	8,59	6,04	4,17
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ *Transport, Communication, Recreation and culture*	4,67	4,55	1,72	3,62	3,42
f. Hotel dan Restoran/ *Hotels, and restaurants*	7,82	5,26	5,94	7,15	3,49
g.					
h. Lainnya/ *Miscellaneous goods and services*	2,24	6,10	2,63	5,38	3,95
Total Konsumsi/*Total of consumption*	4,10	3,48	3,07	4,74	3,68

https://blitarkota.bps.go.id

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

[4] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Blitar 2013 - 2017
Table 9. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Blitar Municipality 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Juta Rp)*	46.381,23	52.990,23	58.751,61	61.306,98	65.283,32
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	33.188,22	37.880,52	38.553,37	39.605,88	40.532,24
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	1,18	1,22	1,22	1,15	1,13
Pertumbuhan *(ADHK 2010)*	9,25	14,14	1,78	2,73	2,34

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT adh berlaku sebesar 46,38 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 52,99 miliar rupiah (2014), 58,75 miliar rupiah (2015), 61,31 miliar rupiah (2016) dan 65,28 miliar rupiah (2017). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 9,25 persen (2013), 14,14 persen (2014), 1,78 persen (2015), 2,73 persen (2016), dan 2,34 persen (2017).

https://blitarkota.bps.go.id

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Blitar 2013 - 2017
Table 10. Trend of Government Final Consumption Expenditure, Blitar Municipality 2013-2017

https://blitarkota.bps.go.id

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB *(Juta Rp)*	1.144.954,49	1.192.827,41	1.277.685,89	1.257.504,56	1.398.841,05
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	774.074,38	793.317,99	808.000,27	757.479,47	785.082,32
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	29,14	27,39	26,51	23,59	24,11
Pertumbuhan[5] Total konsumsi pemerintah	5,15	2,49	1,85	-6,25	3,64

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1,14 triliun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1,19 triliun rupiah (2014), 1,28 triliun rupiah (2015), 1,26 triliun rupiah (2016), dan 1,39 triliun rupiah (2017). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

[5] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB justru mengalami penurunan, dari 29,14 persen (tahun 2013) hingga mencapai 24,11 persen (tahun 2017). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 23,59 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013, dengan total pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,13 persen

https://blitarkota.bps.go.id

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[6]. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (enam) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 meningkat dari 3,95 persen (2013) menjadi 6,00 persen (2017), sementara di tahun lainnya masing-masing 3,63 persen(2014); 5,55 persen(2015); dan 5,84 persen(2016). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2017.

[6] *Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kota Blitar 2013 - 2017
Table 11. Trend and Structure of GFCF,
Blitar Municipality 2013-2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB *(Juta Rp)*	823.132,77	905.927,61	993.708,01	1.100.380,58	1.206.373,72
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	697.194,75	722.508,50	762.615,94	807.132,21	855.586,61
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	20,95	20,81	20,62	20,64	20,79
Struktur PMTB [7]					
a. Bangunan					
(*Juta Rp*)	681.270,96	752.873,08	824.785,22	920.201,40	1.007.859,85
(%)	82,77	83,11	83,00	83,63	83,54
b. Non Bangunan					
(*Juta Rp*)	141.861,81	153.054,53	168.922,79	180.179,18	198.513,87
(%)	17,23	16,89	17,00	16,37	16,46
Total PMTB					
(Juta Rp)	823.132,77	905.927,61	993.708,01	1.100.380,58	1.206.373,72
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan[8] (%)					
a. Bangunan	4,35	3,67	5,49	6,07	6,02
b. Non Bangunan	2,22	3,48	5,83	4,79	5,92
Total PMTB	3,95	3,63	5,55	5,84	6,00

https://blitarkota.bps.go.id

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang

[7] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*
[8] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Blitar 2013 - 2017
Table 12. Trend and Structure of Changes in Inventories Blitar Municipality 2013-2017

U r a I a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Juta Rp)*	85,70	23.961,83	2.195,81	2.214,81	2.294,54
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	122,01	31.971,55	2.718,86	2.676,00	2.749,85
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,00	0,55	0,05	0,04	0,04

https://blitarkota.bps.go.id

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 85,70 juta rupiah, yang kemudian meningkat tajam pada tahun 2014 – 2017. Pada tahun 2014 mencapai sebesar 23,96 miliar rupiah, 2,19 miliar rupiah (2015); 2,21 milyar rupiah (2016) dan pada tahun 2017 perubahan inventori kembali mencapai 2,29 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Blitar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, proporsi perubahan inventori adalah 0,00 persen, selanjutnya 0,55 persen (2014), 0,05 persen (2015), dan 0,04 persen di tahun 2016 dan 2017. Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2014.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Blitar, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 13. Perkembangan Ekspor Kota Blitar 2013 - 2017
Table 13. Trend of Export, Blitar Municipality 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB *(Juta Rp)*	1.613.286,60	1.784.228,48	2.050.833,05	2.320.022,54	2.701.776,51
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	1.469.845,48	1.568.097,01	1.715.228,89	1.903.667,52	2.144.285,36
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	41,06	40,98	42,56	43,52	46,56
Pertumbuhan[9]	9,84	6,68	9,38	10,99	12,64

https://blitarkota.bps.go.id

Secara total, dalam kurun waktu 2013-2017 nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1,61 triliun rupiah meningkat menjadi sebesar 1,78 triliun rupiah pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015-2017 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2,05 triliun rupiah; 2,32 triliun rupiah; dan 2,70 triliun rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 1,47 triliun rupiah (2013); 1,57 triliun rupiah (2014); 1,72 triliun rupiah (2015); 1,90 triliun rupiah (2016); dan 2,14 triliun rupiah (2017). Sementara itu, pada periode 2013 s.d 2017, proporsi dalam PDRB juga cenderung meningkat dari 41,06 persen pada tahun 2013 menjadi 46,56 persen di tahun 2017.

[9] *Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010*

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2016 dan 2017 dengan masing-masing tahun mencapai 10,99 persen dan 12,64 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Blitar. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Blitar. di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Blitar terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kota Blitar meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2013 s.d 2017. Pada tahun 2013 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 2,54 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 2,71 triliun rupiah, 2,88 triliun rupiah pada tahun 2015; 3,05 triliun rupiah pada tahun 2016, dan menjadi 3,52 triliun rupiah pada tahun 2017. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2013 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 64,54 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 62,18 persen dan 59,68 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015. Selanjutnya,

https://blitarkota.bps.go.id

pada tahun 2016-2017 proporsi impor barang dan jasa sebesar 57,14 persen dan 60,72 persen.

Tabel 14. Perkembangan Impor Kota Blitar 2013 - 2017
Table 14. Trend of Import, Blitar Municipality 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB *(Juta Rp)*	2.536.296,76	2.707.425,26	2.875.903,93	3.046.501,70	3.523.206,33
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	1.978.830,35	2.093.199,37	2.152.330,28	2.242.930,37	2.459.823,49
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	64,54	62,18	59,68	57,14	60,72
Pertumbuhan[10]	7,55	5,78	2,82	4,21	9,67

https://blitarkota.bps.go.id

[10] *Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010*

https://blitarkota.bps.go.id

Bab 4

Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disjikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Blitar, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Blitar 2013 - 2017

Table 15. Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRDP, Blitar Municipality 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB *(Juta Rp)*					
- ADHB	3.929.509,08	4.354.284,12	4.819.127,97	5.331.286,72	5.802.364,14
- ADHK 2010	3.446.832,13	3.649.649,30	3.856.908,42	4.079.258,84	4.315.014,82
PDRB perkapita *(Ribu Rp)*					
- ADHB	28.956,90	31.805,62	34.944,51	38.322,32	41.446,94
- ADHK 2010	25.400,01	26.658,65	27.967,26	29.322,50	30.822,64
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	5,73	4,96	4,91	4,85	5,12
Jumlah penduduk *(000 org)*	135.702	136.903	137.908	139.117	139.995
Pertumbuhan	0,73	0,89	0,73	0,88	0,63

Tabel 15 menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Kota Blitar dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Blitar rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara "riil" juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,6 – 0,9 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Blitar (sekitar 70 persen), artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Blitar sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 16. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Juta Rp)*	2.837.965,04	3.101.773,82	3.311.857,53	3.636.358,97	3.951.001,32
Total Ekspor (ADHB) *(Juta Rp)*	1.613.286,60	1.784.228,48	2.050.833,05	2.320.022,54	3.701.776,51
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	**1,76**	**1,74**	**1,61**	**1,57**	**1,46**

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 1,76 kali dari yang dieskpor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan *(supply)* domestik diserap untuk memenuhi permintaan

konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2013 – 2017, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukan kecenderungan menurun. Secara implisit data tersebut menjelaskan, walaupun nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor semakin meningkat namun peningkatan nilai ekspor jauh lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan rasio tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekspor yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

https://blitarkotabps.go.id

Tabel 17. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) *(Juta Rp)*	2.837.965,04	3.101.773,82	3.311.857,53	3.636.358,97	3.951.001,32
Total PMTB (ADHB) *(Juta Rp)*	823.132,77	905.927,61	993.708,01	1.100.380,58	1.206.373,72
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	**3,45**	**3,42**	**3,33**	**3,30**	**3,28**

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun. Pada tahun 2013 dan 2014 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 3,45. Pada tahun 2014 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB turun menjadi 3,42 dan terus menurun menjadi 3,33 tahun 2015 dan di tahun 2017 rasionya menjadi 3,28. Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 18. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Blitar, Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Juta Rp)*					
a. Rumah tangga	2.837.965,04	3.101.773,82	3.311.857,53	3.636.358,97	3.951.001,32
b. LNPRT	46.381,23	52.990,23	58.751,61	61.306,98	65.283,32
c. Pemerintah	1.144.954,49	1.192.827,41	1.277.685,89	1.257.504,56	1.398.841,05
Jumlah	4.029.300,76	4.347.591,46	4.648.295,03	4.955.170,50	5.415.125,70
PDRB (ADHB) *(Juta Rp)*	3.929.509,08	4.354.284,12	4.819.127,97	5.331.286,72	5.802.364,14
Proporsi (%)	**102.54**	**99.85**	**96,46**	**92,95**	**93.33**

https://blitarkota.bps.go.id

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir, bahkan pada tahun 2013 permintaan konsumsi akhir melebihi nilai PDRB nya. untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir tersebut, Kota Blitar harus melakukan impor. Hal ini wajar dikarenakan sumber daya alam yang kurang mencukupi mengingat luas wilayah yang sangat kecil sehingga sektor primer seperti pertanian memang kurang bisa dapat dikembangkan dan tidak banyak investasi industri yang ditanamkan di Kota Blitar.

Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin menurun. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar Kota Blitar. Untuk menghasilkan produk yang di ekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 19. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) *(Juta Rp)*	1.613.286,60	1.784.228,48	2.050.833,05	2.320.022,54	3.701.776,51
Total PMTB (ADHB) *(Juta Rp)*	823.132,77	905.927,61	993.708,01	1.100.380,58	1.206.373,72
Rasio Ekspor terhadap PMTB	**1,96**	**1,97**	**2,06**	**2,11**	**2,24**

https://kabblitarkota.bps.go.id

Selama tahun 2013-2017, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB dan rasio ekspor terhadap PMTB juga mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (tabel 19). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 20 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2013 - 2017 cenderung meningkat dari sebesar 1,55 pada tahun 2013 menjadi 1,61 pada tahun 2014 dan 1,68 persen pada tahun 2015. Pada tahun berikutnya rasionya terus mengalami

peningkatan menjadi 1,75 (2016) namun pada tahun 2017 menurun menjadi 1,65. Peningkatan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin menurun.

Tabel 20. Rasio PDRB terhadap Impor
Kota Blitar, Tahun 2012—2016

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) *(Juta Rp)*	3.929.509,08	4.354.284,12	4.819.127,97	5.331.286,72	5.802.364,14
Total Impor (ADHB) *(Juta Rp)*	2.536.296,76	2.707.425,26	2.875.903,93	3.046.501,70	3.523.206,33
Rasio PDRB terhadap Impor	**1,55**	**1,61**	**1,68**	**1,75**	**1,65**

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 21. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kota Blitar, Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)					
(Juta Rp)	3.929.509,08	4.354.284,12	4.819.127,97	5.331.286,72	5.802.364,14
%	*(60,77)*	*(61,66)*	*(62,63)*	*(63,64)*	*(62,22)*
Total nilai Impor ADHB	2.536.296,76	2.707.425,26	2.875.903,93	3.046.501,70	3.523.206,33
(Juta Rp)	*(39,23)*	*(38,34)*	*(37,37)*	*(36,36)*	*(37,78)*
%					
Total Permintaan Akhir[1] *(Juta Rp)*	6.465.805,83	7.061.709,38	7.695.031,90	8.377.788,43	9.325.570,47
%	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*

[1] *Termasuk diskrepansi statistik*

https://blitarkota.bps.go.id

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 36 s.d 39 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 60 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 6,47 triliun rupiah (2013) menjadi sebesar 9, 33 triliun rupiah (2017).

Di sisi lain "penyediaan" produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 3, 93 triliun rupiah (2013); 4,35 triliun rupiah (2014); 4.82 triliun rupiah (2015); 5,33 triliun rupiah (2016); dan 5,80 triliun rupiah (2017). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa di impor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 2,54 triliun rupiah (2013); 2,71 triliun rupiah (2014); 2.88 triliun rupiah (2015); 3,05 triliun rupiah (2016); dan 3,52 triliun rupiah (2017).

https://blitarkota.bps.go.id

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **"Ekspor Neto"**, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 22. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kota Blitar Tahun 2013—2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) *(juta Rp)*	1.613.286,60	1.784.228,48	2.050.833,05	2.320.022,54	3.701.776,51
Nilai Impor (ADHB)*(jutar Rp)*	2.536.296,76	2.707.425,26	2.875.903,93	3.046.501,70	3.523.206,33
Net ekspor (X – M) *(juta Rp)*	(923.010,16)	(923.196,78)	(825.070,88)	(726.479,17)	(821.429,82)
Rasio ekspor thdp Impor	**0,64**	**0,66**	**0,71**	**0,76**	**0,77**

Sementara rasio ekspor terhadap impor selama tahun 2013-2017 terus meningkat. Pada tahun 2013 rasionya sebesar 0,64 kemudian meningkat menjadi sekitar 0,77 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa nilai impor semakin berkurang peranannya dalam perdagangan Kota Blitar artinya Kota Blitar semakin baik dalam memenuhi konsumsi masyarakatnya.

https://blitarkota.bps.go.id

Bab 5
PENUTUP

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Blitar pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota .Blitar terhadap ekonomi luar daerah.

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

LAMPIRAN

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	**2.837.965,04**	**3.101.773,82**	**3.311.857,53**	**3.636.358,97**	**3.951.001,32**
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	730.888,75	755.718,35	783.618,36	846.145,30	909.180,01
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	77.113,97	82.088,39	87.741,16	99.020,40	109.485,91
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan rt	444.819,52	478.918,37	505.967,79	546.452,00	589.622,99
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	316.394,16	337.024,40	384.875,01	428.704,82	466.828,92
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	758.998,06	871.359,87	931.145,54	1.023.116,89	1.122.844,92
1.f. Hotel dan Restoran	361.668,19	408.660,41	445.240,83	499.568,12	540.946,53
1.g. Lainnya	148.082,39	168.004,03	173.268,84	193.351,44	212.092,04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**46.381,23**	**52.990,23**	**58.751,61**	**61.306,98**	**65.283,32**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**1.144.954,49**	**1.192.827,41**	**1.277.685,89**	**1.257.504,56**	**1.398.841,05**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**823.132,77**	**905.927,61**	**993.708,01**	**1.100.380,58**	**1.206.373,72**
4.a. Bangunan	681.270,96	752.873,08	824.785,22	920.201,40	1.007.859,85
4.b. Non-Bangunan	141.861,81	153.054,53	168.922,79	180.179,18	198.513,87
5. Perubahan Inventori	**85,70**	**23.961,83**	**2.195,81**	**2.214,81**	**2.294,54**
6. Ekspor	**1.613.286,60**	**1.784.228,48**	**2.050.833,05**	**2.320.022,54**	**2.701.776,51**
7. Impor	**2.536.296,76**	**2.707.425,26**	**2.875.903,93**	**3.046.501,70**	**3.523.206,33**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**3.929.509,08**	**4.354.284,12**	**4.819.127,97**	**5.331.286,72**	**5.802.364,14**

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	**2.451.237,64**	**2.589.073,11**	**2.682.121,38**	**2.811.628,13**	**2.946.601,92**
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	608.306,67	621.020,58	629.834,77	649.383,02	671.652,19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	65.712,67	69.663,60	73.696,00	76.685,31	79.895,56
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan rt	401.097,69	413.094,04	431.365,69	452.141,16	472.295,06
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	261.239,06	272.049,49	286.090,33	300.529,97	314.162,87
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	692.463,43	760.353,63	798.815,60	847.054,47	898.868,13
1.f. Hotel dan Restoran	286.084,95	307.114,98	315.832,81	330.720,73	346.045,87
1.g. Lainnya	136.333,17	145.776,81	146.486,18	155.113,48	163.682,23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**33.188,22**	**37.880,52**	**38.553,37**	**39.605,88**	**40.532,24**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**774.074,38**	**793.317,99**	**808.000,27**	**757.479,47**	**785.082,32**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**697.194,75**	**722.508,50**	**762.615,94**	**807.132,21**	**855.586,61**
4.a. Bangunan	569.853,82	590.741,08	623.162,73	661.003,70	700.812,02
4.b. Non-Bangunan	127.340,93	131.767,42	139.453,21	146.128,51	154.774,59
5. Perubahan Inventori	**122,01**	**31.971,55**	**2.718,86**	**2.676,00**	**2.749,85**
6. Ekspor	**1.469.845,48**	**1.568.097,01**	**1.715.228,89**	**1.903.667,52**	**2.144.285,36**
7. Impor	**1.978.830,35**	**2.093.199,37**	**2.152.330,28**	**2.242.930,37**	**2.459.823,49**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**3.446.832,13**	**3.649.649,30**	**3.856.908,42**	**4.079.258,84**	**4.315.014,82**

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017

Persen

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	**72,22**	**71,23**	**68,72**	**68,21**	**68,09**
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	18,60	17,36	16,26	15,87	15,67
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,96	1,89	1,82	1,86	1,89
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan rt	11,32	11,00	10,50	10,25	10,16
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,05	7,74	7,99	8,04	8,05
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	19,32	20,01	19,32	19,19	19,35
1.f. Hotel dan Restoran	9,20	9,39	9,24	9,37	9,32
1.g. Lainnya	3,77	3,86	3,60	3,63	3,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**1,18**	**1,22**	**1,22**	**1,15**	**1,13**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**29,14**	**27,39**	**26,51**	**23,59**	**24,11**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**20,95**	**20,81**	**20,62**	**20,64**	**20,79**
4.a. Bangunan	17,34	17,29	17,11	17,26	17,37
4.b. Non-Bangunan	3,61	3,52	3,51	3,38	3,42
5. Perubahan Inventori	**0,00**	**0,55**	**0,05**	**0,04**	**0,04**
6. Ekspor	**41,06**	**40,98**	**42,56**	**43,52**	**46,56**
7. Impor	**64,54**	**62,18**	**59,68**	**57,14**	**60,72**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017

Persen

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	**6,53**	**5,62**	**3,59**	**4,83**	**4,80**
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	2,89	2,09	1,42	3,10	3,43
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,23	6,01	5,79	4,06	4,19
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan rt	7,41	2,99	4,42	4,82	4,46
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,50	4,14	5,16	5,05	4,54
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	8,46	9,80	5,06	6,04	6,12
1.f. Hotel dan Restoran	8,34	7,35	2,84	4,71	4,63
1.g. Lainnya	6,62	6,93	0,49	5,89	5,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**9,25**	**14,14**	**1,78**	**2,73**	**2,34**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**5,15**	**2,49**	**1,85**	**-6,25**	**3,64**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**3,95**	**3,63**	**5,55**	**5,84**	**6,00**
4.a. Bangunan	4,35	3,67	5,49	6,07	6,02
4.b. Non-Bangunan	2,22	3,48	5,83	4,79	5,92
5. Perubahan Inventori	**336,51**	**26.104,07**	**-91,50**	**-1,58**	**2,76**
6. Ekspor	**9,84**	**6,68**	**9,38**	**10,99**	**12,64**
7. Impor	**7,55**	**5,78**	**2,82**	**4,21**	**9,67**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**6,50**	**5,88**	**5,68**	**5,76**	**5,78**

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

https://blitarkota.bps.go.id

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)

Menurut Pengeluaran, Kota Blitar Tahun 2013 - 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	**115,78**	**119,80**	**123,48**	**129,33**	**134,09**
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	120,15	121,69	124,42	130,30	135,36
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	117,35	117,84	119,06	129,13	137,04
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan rt	110,90	115,93	117,29	120,86	124,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	121,11	123,88	134,53	142,65	148,59
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	109,61	114,60	116,57	120,79	124,92
1.f. Hotel dan Restoran	126,42	133,06	140,97	151,05	156,32
1.g. Lainnya	108,62	115,25	118,28	124,65	129,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**139,75**	**139,89**	**152,39**	**154,79**	**161,07**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**147,91**	**150,36**	**158,13**	**166,01**	**178,18**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**118,06**	**125,39**	**130,30**	**136,33**	**141,00**
4.a. Bangunan	119,55	127,45	132,35	139,21	143,81
4.b. Non-Bangunan	111,40	116,16	121,13	123,30	128,26
5. Perubahan Inventori	**70,24**	**74,95**	**80,76**	**82,77**	**83,44**
6. Ekspor	**109,76**	**113,78**	**119,57**	**121,87**	**126,00**
7. Impor	**128,17**	**129,34**	**133,62**	**135,83**	**143,23**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**114,00**	**119,31**	**124,95**	**130,69**	**134,47**

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

https://blitarkota.bps.go.id

https://blitarkota.bps.go.id

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

3. _____*Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.

4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.

5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stock*s, Netherlands, 1992.

6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.

7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

https://blitarkota.bps.go.id

SENSUS EKONOMI 2016

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

https://blitarkota.bps.go.id

BADAB PUSAT STATISTIK
KOTA BLITAR
Jalan Kalimantan No.40 Blitar
Telp:(0342) 801418
Homepage: http://blitarkota.bps.go.id
E-mail: bps3572@bps.go.id; bps3572@gmail.com